

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

*Stakeholder* atau pemangku kepentingan diartikan sebagai sebuah kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi untuk mencapai tujuan sebuah organisasi tertentu (Freeman,1984:31) dalam (Cahyadi,2019). Tujuan organisasi tersebut dapat diterapkan di berbagai bidang antara lain mengenai pembangunan pedesaan, pengelolaan di suatu daerah, dan bahkan dalam pengembangan sektor pariwisata. Dalam semua bidang tersebut yang dikelola oleh para pemangku kepentingan ini memiliki peran dan kepentingannya masing – masing, hal tersebut sangat berpengaruh pada kolaborasi mereka dalam mengelola apa yang ingin dicapai. Dalam bidang pariwisata, *stakeholders* memiliki kemampuan, pengetahuan dan pengalaman dalam pengaturan pariwisata sebagai pemangku kepentingan utama. Para pemangku kepentingan ini memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti permasalahan pariwisata dengan peran yang mereka miliki dalam pengembangan kawasan wisata, jadi seharusnya dalam pengembangan pariwisata tidak hanya dikelola oleh satu pihak saja karena diperlukannya peran dari pihak lain (Gustiana dan Mussadun, 2018). Kemampuan dalam menindaklanjuti permasalahan pariwisata dapat dilakukan oleh *stakeholder* yang didukung dengan adanya kolaborasi lima unsur atau pihak lain dari pemangku kepentingan dimana menurut Arief Yahya antara lain *academician, business, community, government, dan media* yang di sebut *pentahelix*. Menurut Halibas et al (2017:162) *pentahelix* mempunyai peranan yang penting dalam menciptakan pengalaman kepariwisataan dan memberikan keuntungan untuk masyarakat, lingkungan, dan perkembangan ekonomi suatu daerah.

Salah satu peran stakeholder terkait pariwisata budaya menegaskan bahwa peran dari masing – masing *stakeholder* sangat penting dalam mengelola sumber daya pariwisata baik dari kalangan sektor pemerintah, swasta, masyarakat, dan bisnis, dimana dalam mengelola destinasi pariwisata yang tentunya harus ada keterkaitan antar para *stakeholder* bukan hanya salah satu pihak saja, karena dukungan seluruh *stakeholder* pariwisata akan menjadi sebuah satu kesatuan dalam

mengelola destinasi pariwisata melalui perannya masing – masing (Sunarti, Hakim, dan Simanjorang, 2020). Dalam menindaklanjuti pengembangan pariwisata dari keseluruhan peran stakeholder yang terlibat dapat di analisis melalui tahapan pengembangan dari Tourism Area Life Cycle (TALC) yaitu tahap eksplorasi, tahap keterlibatan, tahap pengembangan, dan tahap konsolidasi. Pada tahap pengembangan tersebut terdapat stakeholder yang mempunyai perannya masing – masing bisa sebagai regulator, coordinator, fasilitator, implementor, dan bahkan akseptator dan di setiap tahap pengembangan tersebut memiliki kebutuhan yang berbeda – beda di dalam pengembangan pariwisata. Maka dari itu, pada setiap tahapan tersebut, setiap *stakeholder* harus dapat menyesuaikan, mengoptimalkan, mempersiapkan dari perannya masing – masing dan dapat menjadi kesempatan bagi para *stakeholder* dalam melakukan perannya pada tahap – tahap pengembangan berikutnya (Mei Kurniati, 2021).

Kota Bekasi untuk sektor pariwisata terkenal sebagai *urban tourism* (wisata perkotaan) dan *industrial tourism* (wisata industri). Terdapat potensi wisata lain di Kota Bekasi yaitu Kampung Kranggan yang terletak di Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi yang masih melestarikan kegiatan adat seperti babaritan, menyambut bulan suro, adat gegendeh dan ciri khas budaya pasundan yang tetap terjaga lainnya. Sesuai yang dikemukakan oleh (Darmadjadi, 2001) menyatakan bahwa segala hal dengan keadaan yang baik dan nyata berupa *tangible* atau *intangibile* yang dapat dikembangkan, diatur, dan dikelola sebaik mungkin sehingga dapat bermanfaat atau dimanfaatkan dengan diwujudkannya sebagai kekuatan, keunikan yang berguna untuk pengembangan kepariwisataan yang berupa suasana, kejadian, benda, dan layanan atau jasa – jasa. Fakta di lapangan Kampung Kranggan mempunyai tujuh sumur tua yang telah ditetapkan sebagai situs cagar budaya dan akan dijadikan sebagai destinasi wisata budaya oleh Pemerintah Kota Bekasi. Tujuh sumur tua di Kecamatan Jatisampurna yakni Sumur Bandung, Sumur Batu, Sumur Binong, Sumur Ciburial, Sumur Hulu Cai, Sumur Sela Miring, dan Sumur Tengah. Lalu terdapat rumah adat rumah adat yang ada sejak abad ke – 17. Dan telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya sesuai keputusan Walikota Bekasi Nomor:431/Kep.255-Porbudpar/VI/201.

Faktanya sudah ada beberapa gagasan yang tengah direncanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bersama *stakeholder*, bersama kelompok kerja masyarakat yaitu tim Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kota Bekasi pada Desember 2018 telah mengikuti Kongres Kebudayaan Indonesia dengan memperkenalkan Kampung Kranggan yang masih menjaga kebudayaannya sejak turun menurun dan mendapat dukungan dari para tokoh Kampung Kranggan sebagai destinasi wisata budaya. Dalam hal ini tahap pengembangan pada fase eksplorasi sudah dilakukan dimana suatu daerah baru Ketika pemerintah daerah dan masyarakat mulai memperkenalkan dan memikirkan untuk mengembangkan pariwisata daerahnya (Richard Butler, 1978). Tetapi program yang tengah dicanangkan oleh para *stakeholder* pariwisata dalam mengembangkan Kampung Budaya Kranggan terdapat masalah pendanaan yang masih sangat minim dari Pemerintah Kota Bekasi sehingga belum ada kepastian mengenai kebijakan terhadap kualitas Kampung Budaya Kranggan. Dimana dalam tingkat pemerintah daerah seharusnya memiliki pengaruh yang luas dan signifikan terhadap pengelolaan pariwisata seperti harus berkoordinasi dengan upaya pengelolaan sektor lain dan dengan pemangku kepentingan khususnya masyarakat, pemerintah harus menghormati skala dan karakter dari destinasi, pemerintah harus memfasilitasi partisipasi pemangku kepentingan lainnya, pemerintah harus efisien dan efektif dalam membuat anggaran yang dikeluarkan untuk destinasi yang akan dikelola, pemerintah harus bersifat memantau, adaptif, dan mendidik, dan pemerintah harus memastikan pengalaman Pengunjung disebuah destinasi yang berkualitas (Cahyadi, 2019 : 58-60).

Sedangkan masyarakat hanya mengelola destinasi secara mandiri dengan bergotong royong untuk menjaga, melestarikan, melakukan perbaikan cagar budaya dimana menurut (Amalyah, Hamid, dan Hakim, 2016)) terdapat salah satu peran yang dimiliki oleh masyarakat yaitu kontrol penuh terhadap kebijakan dan peraturan yang ada di daerahnya dalam hal kegiatan operasional di bidang kepariwisataan di daerahnya. Tetapi yang terjadi di lapangan, masyarakat tidak memiliki kontrol yang cukup kuat hanya memberikan ide atau gagasan dan mengelolanya secara mandiri tanpa adanya kebijakan yang kuat terhadap kualitas Kampung Budaya Kranggan, komunikasi antar pemerintah dan masyarakat sudah

terjalin namun bersifat satu arah dan apabila terus berlanjut, tidak ada perubahan yang dirasakan oleh masyarakat dari keikutsertaan mereka dalam pengelolaan Kampung Budaya Kranggan. Maka dari itu, (Millar, 2006) dalam (Syifa, 2019) telah menyatakan ada beberapa tantangan dalam keterlibatan peran *stakeholder* dalam pengelolaan pariwisata budaya dimana terdapat kasus bahwa masyarakat setempat dan sektor perekonomian sering kali ditinggalkan dalam proses pengelolaan sedangkan partisipasi masyarakat juga sangat penting. Secara teoritis dalam (Cahyadi, 2019) kekuatan dari peran masyarakat lokal untuk mempengaruhi pengambilan keputusan serta pembuatan kebijakan akan tergantung pada tingkat pendekatan partisipatif yang sedang beroperasi di tujuan tertentu. Menurut (Cahyadi, 2019) yang merupakan peran masyarakat terkait dengan pariwisata, antara lain: dapat mengorganisir diri untuk berinteraksi dengan pemerintah di semua tingkatan dan memiliki suara yang representatif dalam struktur pariwisata, dan untuk memaksimalkan berbagai informasi dan pengalaman, mencari peluang kemitraan dengan sektor swasta pariwisata yang sudah mapan, berpartisipasi dalam semua aspek pariwisata termasuk menjadi turis, berpartisipasi aktif dalam mendukung dan mempromosikan pariwisata, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, mendorong media massa dalam memberikan informasi dan kesadaran pariwisata, bekerja sama dengan LSM untuk mendidik masyarakat tentang pariwisata, dan membuat informasi tentang sumber daya dan sikap pariwisata masyarakat.

Lalu dalam aktivitas bisnis hanya masyarakat juga yang masih melakukannya terdiri dari berbagai macam jenis UKM yang dikelola masyarakat seperti Rumah Kreatif dan Kelompok Usaha Bersama (KLM) menurut (Freyer, 1983) dalam (Syifa, 2019) pengelompokan aktivitas bisnis menjadi dua golongan yaitu pelaku langsung yang menyediakan jasa secara langsung terhadap wisatawan dan pelaku tidak langsung berupa usaha – usaha pada produk yang mendukung kegiatan pariwisata. Di sisi lain yang terjadi di lapangan belum adanya pihak ketiga atau pihak swasta yang dapat menciptakan peluang lapangan pekerjaan dan untuk perekonomian yang dihasilkan dari kegiatan pariwisata di Kampung Budaya Kranggan. Hal ini di dukung oleh (Hertifah, 2003) dalam (Syifa, 2019) industri atau swasta seharusnya dapat berperan dalam pelaku bisnis yang dapat menciptakan

peluang lapangan pekerjaan kepada masyarakat sekitar dan telah dikatakan juga menurut Buku Putih tentang Pembangunan dan Promosi Pariwisata dalam (Cahyadi,2019) peran sektor swasta antara lain, melakukan investasi industri pariwisata, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, mengembangkan dan mempromosikan pariwisata, berkolaborasi dengan pemerintah dalam mempromosikan pariwisata, melibatkan masyarakat lokal dalam industri pariwisata, dan memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan manfaat secara langsung.

Mengenai akademisi, hanya sebagai narasumber dan meneliti mengenai kebudayaan masyarakat Kranggan, dari Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Islam 45 Bekasi (UNISMA Bekasi) banyak peran – peran yang masih belum dilakukan oleh akademisi seperti yang dikatakan (Swarbrooke, 1999) dalam (Syifa, 2019) seharusnya yang dilakukan akademisi dalam pengembangan pariwisata dapat membandingkan dampak pariwisata, menjelaskan cara kerja industri pariwisata, dan studi lanjutan antara pariwisata di sebuah destinasi. Fakta di lapangan mereka menganggap tidak mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan untuk pengelolaan kampung budaya Kranggan karena pemerintah tidak terlalu melibatkan mereka ke dalam pengelolaan hanya sekedar memberikan saran – saran mengenai penerapan konsep untuk menjaga cagar budaya, selain itu terdapat kendala yang dihadapi lainnya yaitu penerapan konsep yang harus sesuai dengan kaidah – kaidah di Kampung Kranggan agar tetap menjaga cagar budaya di Kampung Kranggan (Syifa, 2019).

Selain itu, peran media massa untuk saat ini memberikan informasi mengenai keunikan kebudayaan Kampung Kranggan dan masyarakat Kampung Kranggan yang masih terjaga di Kota Bekasi. Publikasi mengenai keunikan Kampung Kranggan memberikan dampak yang menguntungkan di Kampung Kranggan sendiri. Dimana dapat mendatangkan wisatawan mancanegara yang tertarik terhadap kebudayaan Kampung Kranggan yang masih bertahan walaupun era modernisasi terus berkembang dan secara tidak langsung membantu mempromosikan Kampung Kranggan. Tetapi kendala yang dihadapi yaitu terbatasnya jumlah media dalam mempromosikan kepariwisataan di Kota Bekasi

dan kurangnya koordinasi dengan pelaku usaha pariwisata, seperti biro – biro perjalanan wisata (Yuniningsih, 2018). Menurut (Nugroho,2011:94) dalam (Syifa, 2019) bahwa optimalisasi dari peran masing – masing *stakeholder* perlu difungsikan secara maksimal dan optimal karena dengan mengetahui peran dan kepentingan dari setiap *stakeholder* yang ada, akan saling membantu dan dapat mencapai sasaran atau tujuan secara keseluruhan yang sudah dicanangkan.

Dalam praktiknya untuk proses pengelolaan pariwisata di Kampung Budaya Kranggan menggunakan model *pentahelix* untuk mengelola sebuah destinasi wisata dari segi kualitas aktivitas, pelayanan, menciptakan pengalaman dan keuntungan pada masyarakat serta lingkungan kepariwisataan melalui peran *stakeholder*. Sebagaimana yang dikatakan oleh Halibas et al (2017:162) dalam (Syifa,2019) dalam mencapai optimalisasi peran *stakeholder* yang mencakup dari akademisi, bisnis, pemerintah, media, dan masyarakat mempunyai peranan yang penting dalam menciptakan pengalaman kepariwisataan dan memberikan keuntungan untuk masyarakat, lingkungan, dan perkembangan ekonomi suatu daerah.

Melihat fenomena yang telah dijabarkan, peneliti ingin mengetahui bagaimana peranan *stakeholder* untuk mencapai optimalisasi perannya dalam mengembangkan Kampung Budaya Kranggan untuk satu tujuan di bidang kepariwisataan, maka dari itu peneliti mempunyai alasan bahwa dibutuhkannya “Peran Stakeholder dalam Pengembangan Kampung Budaya Kranggan di Kota Bekasi”.

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui sejauh mana peranan *stakeholder* dalam pengembangan Kampung Budaya Kranggan di Kota Bekasi sesuai permasalahan yang terjadi di lapangan seperti peran pemerintah untuk berkoordinasi kepada *stakeholder* lainnya, peran masyarakat untuk berpartisipasi perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap pengembangan Kampung Budaya Kranggan , peran akademisi dalam kewenangan mereka untuk pengembangan Kampung Budaya Kranggan, peran bisnis dalam memperluas lapangan pekerjaan, dan peran media massa dalam mempromosikan Kampung

Budaya Kranggan dalam tahapan pengembangan eksplorasi, keterlibatan, pengembangan, dan konsolidasi agar lebih terkoordinir yang dapat ditinjau sebagai berikut:

1. Siapa saja *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan di Kampung Budaya Kranggan, Kota Bekasi?
2. Bagaimana peran yang dilakukan *stakeholder* dalam pengembangan Kampung Budaya Kranggan di Kota Bekasi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan dari masalah yang telah disampaikan antara lain:

1. Mengidentifikasi *stakeholder* pariwisata yang terlibat dalam pengembangan di Kampung Budaya Kranggan Kota Bekasi untuk dapat dikembangkan melalui optimalisasi peran *stakeholder* pariwisata.
2. Mengetahui peran dari keseluruhan *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan Kampung Budaya Kranggan Kota Bekasi.

### **D. Keterbatasan Penelitian**

Dalam memperoleh data penelitian mengenai peran *stakeholder* dalam pengembangan Kampung Budaya Kranggan Kota Bekasi, kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan mobilitas peneliti di lapangan dan keterbatasan jarak informan karena *pandemic* Covid-19 yang mewajibkan seluruh masyarakat Indonesia untuk membatasi perjalanan. Untuk menyikapi keterbatasan dalam pencarian data, saya melakukan :

1. Menggunakan *zoom meeting* / *google meet* dalam melakukan wawancara kepada *stakeholder* terkait.
2. Melakukan via telephone dan via whatsapp untuk melakukan wawancara kepada narasumber terkait.
3. Menggunakan *google earth* untuk melakukan pencarian data aktual di tempat terkait.

## **E. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini, dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam dunia akademis sebagai sumber dan bahan masukan serta wawasan tambahan bagi peneliti yang membahas mengenai peran *stakeholder* di sebuah destinasi pariwisata.

### 2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan bagi *stakeholder* pariwisata dalam meninjau kembali mengenai pengembangan pariwisata di Kota Bekasi. Khususnya di Kampung Budaya Kranggan pada keberlangsungannya menjadi sebuah destinasi pariwisata.